

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN
DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PAUH
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Srata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh

MASDI
NPM. 190411072

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **MASDI**

NPM : **190411072**

Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**

Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Kuantan Singingi**

Alamat : **Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kuansing**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Teluk Kuantan, Juni 2023

MASDI

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian :ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
PEDESAAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI
DESA TELUK PAUH KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nama Mahasiswa : MASDI
NPM : 190411072
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

SAHRIMUHARAM. S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN: 1008128002

Mengetahui
Ketua Program studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS. S.Sos., M.Si
NIDN: 1002059002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

pada

Hari : Jum'at

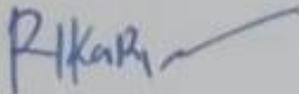
Tanggal : 04

Bulan : Agustus

Tahun : 2023

Tim Penguji

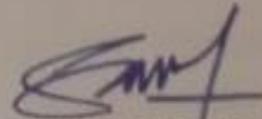
Ketua



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

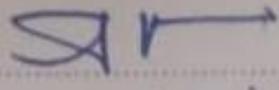
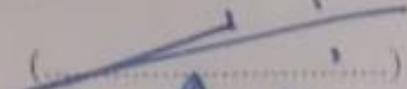
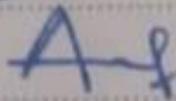
NIDN : 1030058402

Sekretaris



SARJAN M. S. Sos., M.Si

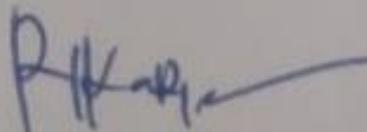
NIDN : 1008128002

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---|
| 1. | Sahri Muharam, S.Sos., M.Si | (Anggota) | () |
| 2. | Desriadi, S.Sos., M.Si | (Anggota) | () |
| 3. | Alsar Andri, S.Sos., M.Si | (Anggota) | () |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN : 1030058402

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PAUH KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
MASDI**

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita pemerintah pusat menjadi kewajiban utama yang mesti di jalankan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk mengarahkan desa-desa yang ada di setiap daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Wujudnya nyata dari perilaku masyarakat pedesaan adalah bentuk partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Pauh Kecamatan

Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penarikan informan yaitu teknik purposive sampling. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat desa. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara peneliti dengan informan dan hasil observasi peneliti, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan dengan cukup tinggi.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

***ANALYSIS OF RURAL COMMUNITY PARTICIPATION IN
DEVELOPMENT IN TELUK PAUH VILLAGE, CERENTI DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY***

MASDI

ABSTRACT

In order to realize what has become the ideals of the central government, it is the main obligation that must be carried out by all regions in Indonesia to direct the villages in each region in accordance with the authority granted by the Central Government to realize participatory-based development. The real form of rural community behavior is a form of rural community participation in development activities. This research was conducted in Teluk Pauh Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine and analyze the participation of rural communities in development in Teluk Pauh Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The type of research used in this study is a type of qualitative research. The technique used in collecting informants is purposive sampling technique. The informants in this study were 7 people consisting of elements of the village government and elements of the village community. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. Based on the results of field research, which the researchers obtained through the results of interviews with informants and the results of observations of researchers, Rural Community Participation in Village

Development in Teluk Pauh Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency can be said to be quite high.

Keywords: Community Participation In Development

KATA PENGANTAR

Bersyukur kita kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan rahmat-Nya serta keridhaan-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan adanya petunjuk dan pertolongan dariNya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Shalawat beriringan salam selalu kita ucapkan kepada pimpinan Islam, yakninya nabi kita Muhammad. SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berhalawat kepadanya, kita selalu mendapatkan syafaatnya.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan kemampuan kami. Banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan, beberapa saran, serta bimbingan kepada kami yang bersifat membangun dalam penulisan penelitian ini.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Tiadalah kata yang patut kami ucapkan selain kata terima kasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberi kami pedoman, serta kepada pihak-pihak lain yang ikut membantu, yang bertujuan adalah untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak meluangkan waktu bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
4. Bapak **Sahri Muharam, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
6. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Bapak/Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi.
7. Terima kasih juga disampaikan Kepada Orang Tua, saudara, dan sahabat penulis.
8. Terimakasih juga untuk Istri tercinta dan anak-anak sekeluarga yang telah memberikan semangat juang.
9. Serta terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Terimakasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin namun jika ada sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dari semua pihak yang

bersifat membangun untuk lebih sempurnanya penulisan dan pelaksanaan penelitian ini nantinya, akan penulis pertimbangkan.

Cerenti, Juli 2023

Penulis

MASDI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Konsep/Landasan Teori.....	7
2.1.1 Konsep/Teori Administrasi Negara.....	7
2.1.2 Konsep/Teori Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Konsep/ Teori Pembangunan	20
2.1.4 Konsep/ Teori Partisipasi Masyarakat.....	24
2.2. Kerangka Pemikiran.....	32
2.3. Defenisi Operasional	33
2.4. Konsep Variabel.....	34

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	3.1. Jenis Penelitian.....	35
	3.2. Informan.....	36
	3.3 Sumber Data.....	36
	3.4. Fokus Penelitian.....	37
	3.5. Lokasi Penelitian.....	37
	3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	3.7. Analisa Data.....	38
	3.8. Jadwal Peneltian.....	40
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
	4.1. Sejarah Desa.....	42
	4.2. Demografis.....	43
	4.3 Kependudukan.....	44
	4.4. Sosial.....	45
	4.5. Kondisi Pemerintahan.....	46
	4.6. Struktur Pemerintahan.....	48
	4.7. Pemerintahan.....	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
	5.1. Identitas Responden Penelitian.....	61
	5.2. Hasil dan Pembahasan.....	63
	5.2.1 Indikator Perencanaan.....	64
	5.2.2 Indikator Pelaksanaan.....	70
	5.2.3 Indikator Pengawasan.....	75
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
	6.1. Kesimpulan.....	82
	6.2. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas beberapa tingkatan, yaitu Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Tingkatan pembagian wilayah itu merupakan bentuk penataan wilayah yang ada dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk tingkat pusat di pimpin seorang presiden, wilayah propinsi di pimpin oleh seorang Gubernur, wilayah Kabupaten/Kota di pimpin oleh Bupati/Walikota, wilayah administrasi kecamatan pimpin oleh seorang Camat, sedangkan untuk desa/kelurahan di pimpin oleh seorang Kepala Desa atau seorang Lurah.

Di masa pemerintahan Orde Baru sistem penyelenggaran pemerintahan di Indonesia bersifat sentralistik dimana dimana segala urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di kendalikan oleh pemerintah pusat. Bergulirnya Era Reformasi pada tahun 1998 merupakan titik balik lahirnya Otonomi Daerah yang notabene merubah paradigma tata Pemerintahan di Indonesia menjadi lebih demokratis dan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sesuai dengan kewenangan yang telah di atur dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan dipertegaskan pula dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat 2 bahwa daerah

Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan di bagi atas kelurahan dan/atau Desa. Salah satu pembagian wilayah dibawah Kabupaten yang memiliki hak otonom sebagaimana layaknya Kabupaten adalah kawasan pedesaan. Adanya hak otonom yang melekat pada kawasan pedesaan dapat dilihat dari penyebutan istilah dengan nama lain atau sesuai dengan asal-usul atau sejarah dari desa itu sendiri, seperti di Sumater Barat di sebut dengan istilah Nagari, di Aceh di sebut Gampong, atau di beberapa daerah lainnya di sebut istilah Kampung.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (<https://id.m.wikipedia.org>). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pamerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian desa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Desa di atas, secara historis dan filosofis masyarakat menjadi kunci utama dalam berbagai kegiatan yang ada di desa, artinya masyarakat menjadi ujung tombak segala apa yang di inginkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai wilayah otonom lokal desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis,

membangun masyarakat menjadi pilihan utama, dan masyarakat desa juga berperan serta dalam membangun desanya bersama-sama dengan Pemerintahan Desa. Berperan sertanya masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat dilibatkan berpartisipasi aktif dalam membangun desa dan ini merupakan hak masyarakat dan amanat Undang-Undang Tentang Desa.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa setidaknya arah pembangunan yang akan dicapai sesuai keinginan masyarakat itu sendiri serta terciptanya proses demokratisasi yang berkeadilan dalam aspek pembangunan di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan berbasis partisipasi masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional yang digalakkan oleh pemerintah beberapa tahun ini dan merupakan bagian dari kebijakan strategis pembangunan melalui penggunaan dana desa.

Dalam rangka mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita pemerintah pusat menjadi kewajiban utama yang mesti di jalankan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk mengarahkan desa-desa yang ada di setiap daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Kawasan pedesaan yang ada di seluruh Indonesia juga memiliki corak ragam yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya yang menandakan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman. Adanya keanekaragaman akan melahirkan identitas tersendiri dari setiap masing-masing daerah. Salah satu dari identitas masing-masing daerah tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat di setiap pedesaan. Wujudnya

nyata dari perilaku masyarakat pedesaan adalah bentuk partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan pembangunan.

Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau yang dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara teritorial daerah otonom ini terdiri dari 229 Desa/Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan dan mayoritas Kabupaten Kuantan Singingi adalah kawasan pedesaan. Dalam rangka untuk memacu pembangunan daerah setiap desa dituntut untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kawasan pedesaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang dituntut untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan adalah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti. Sesuai dengan konsep pembangunan daerah dan kawasan pedesaan, bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam kegiatan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah desa. Konotasi dari aktor pembangunan ini ialah perlunya partisipasi masyarakat atau pun peran serta dalam pembangunan di pedesaan.

Dari observasi ataupun pengamatan awal penulis dilapangan, bahwa di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa masih rendah dan kondisi ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sebagai berikut;

1. Minimnya kehadiran masyarakat untuk menghadiri undangan kegiatan MUSRENBANGDes dari Pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti.

2. Masih kurangnya keaktifan masyarakat ataupun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes Teluk Pauh Kecamatan Cerenti.
3. Penulis juga melihat bahwa, kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti kurangnya mendapat pengawasan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Untuk memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial khususnya adalah disiplin ilmu administrasi negara.
- b. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk merumuskan berbagai kegiatan dalam bidang pembangunan secara umum di kawasan pedesaan.
- b. Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang pembangunan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Secara filosofis teori itu berawal dari pengalaman yang berulang-ulang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan melalui proses pembuktian secara metodologis. Teori juga di istilahkan sebagai dalil, ajaran atau paham tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal; patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan (Budiono dalam Kamus Ilmiah Populer, 635-636).

Kata teori juga dikaitkan dengan temuan hasil penelitian, sebagai temuan dalam penelitian maka setiap teori berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Menurut Faried Ali (2015:2) bahwa Perkembangan pemikiran manusia yang bermula dari pemikiran induktif yang didapatkan secara rasional, hingga kepemikiran deduktif yang ditemukan dari hasil penelitian dan selanjutnya ke pemikiran yang didasarkan pada nilai guna yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai terminologi ataupun pengertian dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan.

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi Negara terdapat dua kata, yaitu administrasi dan negara. Untuk kata pertama adalah “administrasi” secara etimologi administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrate* yang berarti sebagai berikut; (1) melayani, (2) membantu, (3) memenuhi, (4) melaksanakan, (5) menerapkan, (6) mengendalikan, (7) menyelenggarakan, (8) mengarahkan, (9) menghasilgunakan, (10) mengelola, (11) mengatur dan mengurus (Syafiie, 2017:6). Dalam kamus ilmiah populer

administrasi di artikan sebagai kegiatan tata usaha, catat mencatat, menyusun atau menata, mengarsipkan dan kegiatan yang berhubungan dengan perkantoran (Budiono, 2018:13).

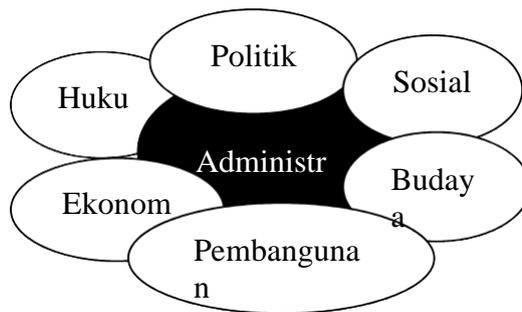
Sedangkan menurut pendapat Leonard B. White administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Kemudian menurut The Liang Gie administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan. Sedangkan Sondang P. Siagian berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafiie, 2017: 4-5).

Administrasi juga diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai fungsi pengorganisasian maka ada tiga fungsi utama yang berhubungan erat dalam administrasi. Kemudian makna menyusun atau menata kita sama artikan dengan kata mengatur untuk menciptakan keteraturan. Mengurus dan pengurusan di arahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang di inginkan (Ali, 2015:1).

Dalam kajian ekologi administrasi teori sistem merupakan teori yang paling dominan dan mudah dipahami untuk memahami kajian administrasi negara.

Teori sistem adalah teori yang saling mempengaruhi antara sistem dengan sub sistem dalam konsep administrasi negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 : Teori Sistem Administrasi Negara



Sumber: Ali, 2015:117

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa teori administrasi bersifat universal dan memerlukan berbagai pendekatan dari berbagai disiplin keilmuan dan lingkungan yang ada di sekitarnya sangat mendukung terbentuknya teori administrasi untuk menciptakan sebuah keteraturan. Sedangkan dalam kajian filsafat administrasi bahwa keteraturan terletak pada jalan lewat kejujuran yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga diperlukan ketabahan yang hanya dapat dibentuk melalui pemahaman moralitas. Hakikat administrasi sebagai sebuah pekerjaan yang tumbuh dan berkembang dalam pemikiran manusia menjadikan administrasi sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang harus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan (Makmur, 2012:10).

Sedangkan dalam konteks normatif ideal pada hakikatnya mengacu kepada kebijakan melembaga, terencana, dan terprogram. Secara filosofis kebijakan melembaga berisikan mempertahankan mutu yang menuntut ke ikhlasan dari semua. Kemudian kebijakan terencana dalam kajian filsafat administrasi

seyogianya berisikan pengembangan dan kaderisasi, pelatihan untuk mencapai keterampilan dan titian menuju profesionalisme (Faried Ali, 2015:26).

Di tingkat atas fungsi pengarahan organisasi, hal ini berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah adalah fungsi manajemen organisasi, hal ini berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Untuk di tingkat bawah merupakan fungsi pengawasan dan pada posisi merupakan kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan adalah mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan tenaga teknis di jalankan sesuai dengan standar yang di tetapkan (Anggara, 2014:11).

Sedangkan untuk kata “negara” pendapat yang paling populer dalam mendefinisikan negara adalah menurut Rober Mac Iver bahwa negara merupakan gabungan antara suatu sistem kelembagaan dengan organisasinya sendiri sehingga bila membahas tentang negara, kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi. Pendapat yang tidak jauh berbeda di kemukakan oleh Kranenburg, bahwa negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan yang diliputinya, sehingga harus ada pemerintah yang berdaulat. Menurut meriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah (dalam Syafiie, 2017:9-10).

Sedangkan pengertian administrasi negara menurut Dimock dan Dimock , merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa di susun, digerakkan dan dikemukakan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Selanjutnya ditambahkan Dimock dan Dimock bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pada yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya (<http://repository.unpas.ac.id.com>).

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro administrasi adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta hubungan diantara mereka. Sedangkan menurut Dwight Waldo administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat yang hampir senada juga di kemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang mengatakan bahwa administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Kemudian menurut Arifin Abdulrachman administrasi negara ialah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara (dalam Syafiie, 2017:32-33).

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi negara adalah kegiatan yang berorientasi pada penyelenggaraan

kegiatan negara. Administrasi sebagai kegiatan penyelenggaraan negara terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Anggara (2016:29) adalah sebagai berikut:

1. *Organisasi*, wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama
2. *Manajemen*, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja, yang meliputi;
 - a. Perencanaan
 - b. Pembuatan keputusan
 - c. Pembimbingan
 - d. Pengoordinasian
 - e. Pengawasan
 - f. Penyempurnaan dan perbaikan
3. *Komunikasi*, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya.
4. *Kepegawaian*, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan.
5. *Keuangan*, yaitu pengelolaan segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. *Perbekalan*, yaitu perencanaan, pengadaan, pengaturan pemakaian barang-barang.
7. *Tata usaha*, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.

8. *Hubungan masyarakat*, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

Selain dari delapan unsur-unsur administrasi diatas, sesuai dengan perkembangan yang ada pada konsep ilmu administrasi ada beberapa isu yang masih berhubungan dengan administrasi khususnya adalah administrasi publik, isu-isu tersebut adalah;

1. Isu pembangunan; dalam mengejar ketinggalan dan memperbaiki keadaan, dimana negara berusaha meningkatkan proses barang dan jasa dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Birokrasi publik; seorang sosiolog yang bernama Max Weber mengatakan bahwa metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Birokrasi hanya berlaku dalam organisasi besar, yaitu organisasi pemerintahan.
3. Kebijakan publik; merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Orientasi dari kebijakan publik adalah masyarakat umum itu sendiri dalam suatu negara, karena masyarakat pada prinsipnya harus diurus, diatur dan dilayani dengan baik (Syafie, 2015:93-104).

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut kepustakaan internasional disebut *policy* artinya kebijakan atau kebijaksanaan. Persoalan kebijakan dalam suatu negara merupakan bagian yang sangat urgen terutama bagi para pelaku pembuat kebijakan itu sendiri guna menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam masyarakat demokratis, masalah kebijakan begitu penting. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang ekonomi atau sosio ekonomi hal tersebut lebih diutamakan lagi dalam kebijakan publik, oleh sebab itu kebijakan dijadikan sebagai alat bagi pejabat publik untuk lebih dapat menetapkan kebijakan-kebijakan secara lebih baik. Fenomena dilingkungan masyarakat juga terlihat statis dan fundamental, sehingga membutuhkan proses pemecahan kebijakan yang lebih efektif dan intensif.

Dengan demikian proses kebijakan ialah berhubungan dengan lembaga elit dan pengikut-pengikutnya yang mempunyai kesamaan satu sama lainnya dalam memberikan pandangan-pandangan pada proses tersebut (Thoha, 2013:53). Lippman berpendapat bahwa kebijakan merupakan kepentingan publik yang harus dipilih menurut hati nurani masyarakat, diketahui dengan jelas dan mempertimbangkan secara rasional (dalam Suryaningrat, 2011:24). Sedangkan Carl Freidrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai (dalam Winarno, 2010:1).

Adapun pendapat David Easton tentang kebijakan adalah sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah (dalam Nugroho, 2018:4). Dalam analisis sistemnya, Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan (*ready-made*) guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam suatu studi keluaran kebijakan

(dalam Varma, 2012:291). Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau output yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi moral, artinya ialah harus melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas N. Dunn (2010:26-28) memberikan gambaran mengenai proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi;

a. Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat rumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini melakukan peramalan yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomentasi terhadap arternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip

kebijakan. Rekomendasi membantu estimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (*monitoring*) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan

Di bagian evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dalam melaksanakan tahapan-tahapan proses kebijakan, menurut Thomas R. Dye ada beberapa model pembuatan atau perumusan kebijakan, yaitu sebagai berikut;

- Model sistem

Model sistem ini pertama kali dikemukakan oleh David Easton dalam teori sistem politik yang disodorkan, bahwa kegiatan kebijakan terdapat serangkaian proses yang saling mempengaruhi. Tekanan dari lingkungan dipandang sebagai masukan (*input*), masukan diproses (*converse*), dan proses tersebut menghasilkan sebuah kebijakan (*out put*) selanjutnya umpan balik kelingkungan (*feed back*) dan itulah yang disebut Easton sebagai sebuah sistem kebijakan publik.

- Model elit

Kebijakan model elit ini sebagai preferensi dari nilai-nilai teori elit-massa yang berkuasa. Teori ini lebih membuat rakyat apatis atau miskin akan informasi tentang kebijakan. Elit lebih banyak memiliki kendali dan sering membentuk opini, jika dibandingkan dengan massa membentuk opini elit.

- Model kelompok

Model kelompok dalam pengambilan kebijakan mengedepankan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Gagasannya dalam kelompok akan menghasilkan kebijakan yang terbaik. Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh kelompok-kelompok yang berkepentingan.

- Model kelembagaan

Model kelembagaan merupakan turunan dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada struktur kelembagaan ketimbang proses atau pola perilaku. Makna dari model ini adalah bahwa tugas membuat kebijakan

adalah tugas pemerintah, maka pemerintah berhak menentukan dengan cara apapun.

- Model proses

Model ini merupakan salah satu aktivitas politik sehingga memerlukan proses, dan begitu juga halnya dengan kebijakan yang menyertakan rangkaian proses politik.

- Model rasionalisem

Kebijakan rasional dirancang untuk memaksimalkan kebijakan yang harus dipilih dan membawa manfaat bagi masyarakat. Rasional disini adalah keputusan yang sudah diperhitungkan secara rasionalitasnya.

- Model inkrementalisem

Model ini menekankan pada kelanjutan kebijakan pemerintah masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles E. Lindblom yang mengkritik teori rasionalitas yang tidak melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan masa lalu.

2. Pengertian Analisis Kebijakan

Dalam kamus ilmiah populer “analisis” atau juga disebut dengan kata analisa, yaitu segenap rangkaian perbuatan yang menelaah sesuatu secara mendalam (Alex, 2014:27). Analisa juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan untuk melihat dan membeberkan fakta dan data tentang sesuatu hal (Rasul. Dkk, 2000:2). Melihat dari pengertian tersebut, analisis adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menelaah sesuatu secara mendalam dan akurat dengan menggambarkan dan membeberkan sesuai data dan fakta mengenai sesuatu hal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan secara sederhana tentang pekerjaan analisis. Kegiatan dalam melakukan analisis meliputi pengumpulan data dan fakta, baik secara keseluruhan maupun sampel, mengklasifikasikan, mengkategorikan, membanding-bandingkan, memberikan komentar atau kritik, dan menyimpulkan hal-hal yang telah dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami orang lain. William N. Dunn (2014:29) memberikan penekanan terhadap analisis kebijakan atau kebijaksanaan sebagai suatu terapan yang menggunakan berbagai metode dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat politik untuk memecahkan masalah publik.

Sedangkan pemikiran Stuart S. Nogel yang dikutip Tangkilisan (2003:1) memandang analisis kebijakan sebagai penentuan alternatif terbaik dari kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan, dan yang akan banyak mencapai seperangkat tujuan di dalam hal hubungan antara kebijakan dan tujuan. Ditambahkan oleh E.S. Quade, bahwa analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kemudian Carl W. Patton dan David S. Savicky menjelaskan analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

Merujuk pada pendapat tersebut diatas, artinya tindakan-tindakan kebijakan tidak akan dapat ditentukan secara tepat tanpa melakukan analisis kebijakan, dengan demikian analisis kebijakan sangat penting. Alasannya ialah

untuk mengetahui apa yang diharapkan dan akibat tak diduga dari sebuah kebijakan. Analisa kebijakan juga bersifat dinamis yang bisa dilakukan kapan dan dimana saja, selagi proses kebijakan tersebut berada pada kaedah-kaedah yang tidak bertentangan dengan kehendak publik (Nugroho D., 2018:83-84).

Budi Winarno dalam bukunya “Teori dan Proses Kebijakan Publik” (2013:27) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni; pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “Pantas”. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metode ilmiah. Ketiga, analisis kebijakan dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan, yaitu;

- a. Pendekatan kelompok
- b. Pendekatan proses fungsional
- c. Pendekatan kelembagaan
- d. Pendekatan peran serta warga negara
- e. Pendekatan psikologis

2.1.3 Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan kata netral dan ambiguitas dalam pandangan umum. Maksudnya ialah suatu kata yang menjelaskan proses dan usaha untuk

meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Melihat pengertian ini makna pembangunan masih bersifat umum dan tentu harus dipertegas lagi menurut pendapat para ahli dalam bidang pembangunan.

Menurut Michael Todaro menyimpulkan pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting di dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (dalam Bryan dan White, 2005:3). Pendapat Inayatullah, pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, serta memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Kemudian ditambahkan oleh Rogers pembangunan ialah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat dan dimaksudkan untuk kemanjuran sosial dan materil (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (dalam Nasution, 2013:28).

Sedangkan W.W. Rostow memberikan pandangan, bahwa pembangunan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, dan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern (dalam Fakhri, 2010:55). Kemudian menurut Siagian (2018:4) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu

negara, bangsa, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Sedangkan Franz Magnis Suseno memandang, bahwa pembangunan harus diarahkan pada martabat manusia, hal itu apabila disertai dua syarat, yaitu; usaha ke arah demokratisasi dan hormat terhadap hak azasi manusia (lihat menguati mitos-mitos pembangunan, 1989:299). Sedangkan Faqih (2010:11) dalam tinjauan sosialnya menilai bahwa pembangunan merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global. Juga kemudian, dalam pandangan sosiologis pembangunan lainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak (1989:49) bahwa ada beberapa prasyarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan, yaitu;

- a. Faktor ekonomis yang primer antar lain sumber daya alam yang kaya, tenaga kerja, modal yang tersedia dan cukup.
- b. Faktor sosial budaya, merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mensukseskan pembangunan. Faktor tersebut antara lain, yaitu; demografik, struktur masyarakat, faktor mental, pendidikan dan dimensi-dimensi struktural kemiskinan.

Kemudian pemikiran pembangunan alternatif yang dipopulerkan oleh laporan *Dag Hammarskjold foundation* dan majalah *Development Dialogue* yang dikutip oleh Nerfin, pembangunan harus didefenisikan sebagai:

- Berorientasi pada kebutuhan (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan nonmaterial).
- Bersifat endogen (berasal dari sanubari tiap masyarakat, yang berdaulat menentukan nilai serta visi masa depannya).

- Bersifat mandiri (berarti bahwa setiap masyarakat pada dasarnya mengandalkan kekuatan dan sumberdaya sendiri dalam artian kekuatan anggotanya serta lingkungan alam dan lingkungan budayanya).
- Secara ekologis baik (memanfaatkan secara rasional sumber daya lingkungan hidup dengan kesadaran penuh akan potensi ekosistem lokal dan juga batas luar global dan lokal yang dibebankan pada generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Berdasarkan transformasi struktural (untuk merealisasikan persyaratan swakelola dan partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh semua yang dipengaruhi keputusan tersebut, mulai dari komunitas pedesaan atau urban sampai dunia secara keseluruhan, tanpa tujuan diatas tidak dapat tercapai) (dalam Hettne, 2001:275).

Sedangkan Arif Budiman (2000:13-14) memberikan definisi sederhana terhadap pembangunan, dimana pembangunan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Maka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan sebagai sebuah kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.

Dari definisi tersebut di atas pembangunan meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif dan menjadi manusia pembangun, tujuannya adalah agar manusia bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya.

2.1.4 Partisipasi dan Masyarakat Pedesaan

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan (<https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi>).

Masih dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, bahwa menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Pertama partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Sedangkan partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini

merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi juga dimaknai sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Menurut Koentjaraningrat (2000), bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela. Sedangkan menurut Esmara (1986), bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berhubungan dengan dukungan dana, fasilitas, dan tenaga dari masyarakat itu sendiri, serta kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi termasuk koordinasi secara teratur dari setiap program pembangunan.

Sedangkan Adisasmita (2006), menjelaskan keterkaitan partisipasi dengan proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembanguna meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal (dalam Solekhan, 2014:141).

Dengan merujuk pada pendapat Adisasmita tersebut dapat dijelaskan tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut;

- 1.) Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya sulit untuk bisa diukur dan tidak jelas arah pembangunannya.

2.) Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pada dasarnya adalah melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui MUSRENBANGDes, sehingga perlu diberikan ruang bagi kepentingan dan inisiatif yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

3.) Partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan

Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan adalah bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Berpedoman pada pendapat di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan komponen lainnya untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan di desa. Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2014:152-153) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi, yakni;

- 1.) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
- 2.) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
- 3.) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
- 4.) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

2. Masyarakat Pedesaan

Dalam interaksi antar penduduk terjadi proses dasar yang disebut proses dekat mendekati (*assosiatif*) dan jauh-menjauhi (*dissosiatif*), proses tersebut

terjadi oleh naluri manusia. Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berhubungan atau berinteraksi berdasarkan suatu hal, sebab motif atau tujuan dan interaksi itu terjadi berkali-kali menurut pola tertentu dan terbentuklah masyarakat. Setiap orang yang terlibat di dalam proses itu adalah warga masyarakat yang bersangkutan. Melalui pola-pola interaksi tersebut, manusia mengelola urusan dan persoalannya (Ndraha, 2010:28). Sebelum mendefinisikan masyarakat pedesaan, terlebih dulu kita harus menjelaskan apa yang disebut dengan masyarakat dan desa. Definisi masyarakat dan desa sangat bervariasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan pendekatan yang digunakan.

Pengertian masyarakat sederhananya ialah kehidupan sosial yang berlangsung dalam suatu wadah (Narwoko dan Suyanto, 2007:124). Menurut Robert Mac Iver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertibkan. Sedangkan rumusan Harold J. Laski, bahwa masyarakat yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (dalam Budiardjo, 2014:33-34).

Masyarakat juga disebut *community* yang diartikan sebagai masyarakat setempat, bisa merujuk kepada sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 2016:142).

Sedangkan dari pendekatan sosiologis lain, “masyarakat” sebagai suatu sistem sosial, sebagaimana yang kemukakan oleh Talcott Parson bahwa sistem sosial adalah proses interaksi diantara para pelaku sosial (*action*), sedangkan yang merupakan struktur sosial adalah struktur relasi antara pelaku itu sebagaimana yang terlihat dalam proses interaksi sosial dan yang dimaksud sistem itu ialah sistem jaringan relasi tersebut. (dalam Narwoko dan Suyanto, 2006:125). Lebih lanjut dikatakan bahwa karakteristik dari sistem sosial adalah kumpulan dari beberapa unsur atau komponen dalam kehidupan masyarakat, sedangkan karakteristik lain sistem sosial sebagaimana yang dikatakan Parsons ialah cenderung mempertahankan *ekuilibrium* atau keseimbangan.

Ciri-ciri dari community "masyarakat" menurut Mac Iver dan Charles (dalam Soekanto, 2016 :134) antara lain adalah sebagai berikut :

a. Seperasaan

Unsur seperasaan timbul akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai "*kelompok kami*".

b. Sepenanggungan

Setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dan dalam kelompok di jalankan sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.

c. Saling memerlukan

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada ‘komuniti-nya’ yang meliputi kebutuhan dan kepentingan.

Sedangkan “desa atau pedesaan” dalam perspektif keilmuan, seperti pendekatan sosial budaya, pendekatan kelembagaan politik dan hukum. Pendekatan sosial budaya, desa diartikan sebagai suatu komunitas masyarakat yang tinggal disuatu lokasi geografis tertentu yang diantara anggota komunitasnya relatif saling kenal dengan baik antara sesamanya. Hal ini karena pola mata pencaharian sebagai sumber utama penghidupan mereka yang relatif sama. Dengan demikian, secara sosial budaya desa dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor mata pencaharian, mempunyai ikatan sosial, adat-istiadat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah (Politik Pemberdayaan, 2006:3).

Dari pendekatan kelembagaan politik, desa diartikan sebagai suatu komunitas politik yang memiliki atribut-atribut kekuasaan atau kewenangan dalam pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam di wilayah geografis komunitas masyarakatnya. Perspektif hukum, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki aturan-aturan tertentu tersendiri yang disepakati oleh komunitasnya, yang berbeda dengan ketentuan aturan-aturan komunitas lainnya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih sederhananya sebagaimana yang dikatakan Soekanto (2016:143), bahwa sebagai perbandingan karakteristiknya masyarakat dapat

dilihat dari dua komponen, yaitu masyarakat desa dan kota. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Perbandingan Karakteristik Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Masyarakat Pedesaan	Masyarakat Perkotaan
Warga memiliki hubungan yang lebih erat.	Jumlah penduduk tidak tentu.
Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan.	Bersifat individualistis.
Umumnya hidup dari pertanian.	Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan.
Golongan orang tua memegang peranan penting.	Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda dengan golongan orang tua.
Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal.	Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan dari pada faktor pribadi.
Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan.	Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestise.
Kehidupan keagamaan lebih kental.	Kehidupan keagamaan lebih longgar
Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota.	Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah dan lain-lain.

Dari tabel diatas sangat jelas sekali perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dan disini penulis tidak mengkaji lebih jauh perbedaan keduanya, melainkan yang menjadi fokus kajian dalam konsep ini adalah masyarakat pedesaan saja.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga di kemukakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak (1986:141) tentang ciri-ciri masyarakat desa, yaitu ;

- a. Hubungan yang lebih erat dan mendalam antar mereka di bandingkan dengan warga desa lain.
- b. Pemukiman di dasarkan kepada kelompok sistem kekeluargaan.
- c. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas hidup dari hasil pertanian, walaupun ada sebagian kecil masyarakatnya bermata pencaharian sektor lain, seperti berdagang, tambang, dan nelayan.

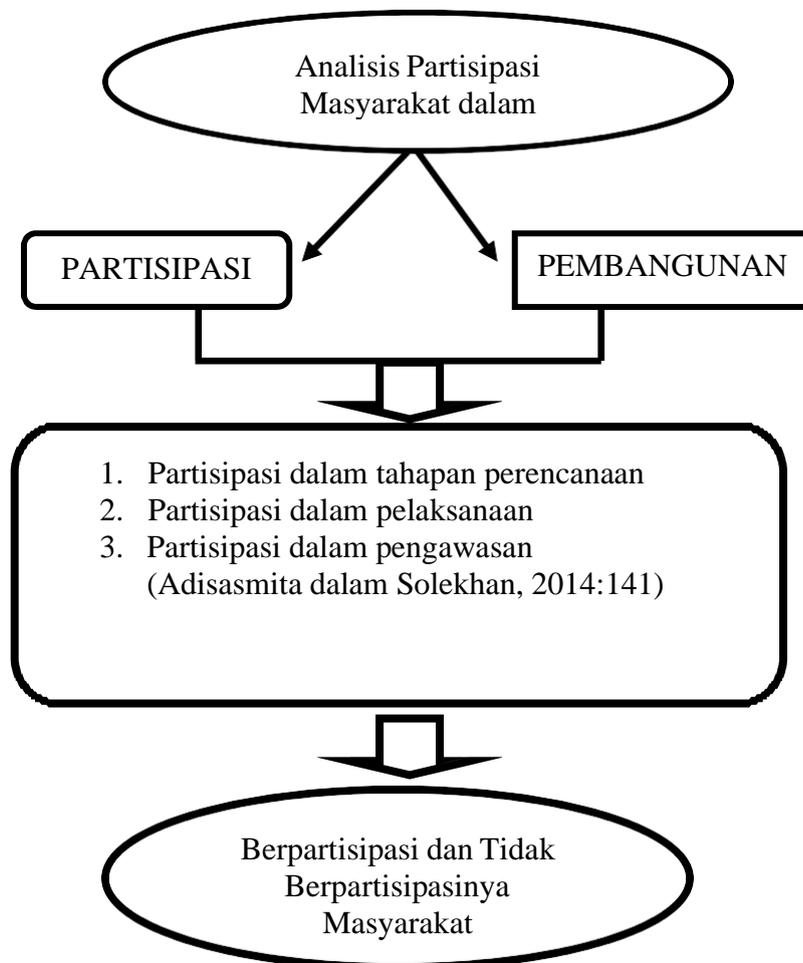
Selain dari beberapa pernyataan di atas, masyarakat pedesaan juga memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu sebagai berikut;

- a. Sistem tolong menolong; aktivitas tolong menolong hidup dalam berbagai macam bentuk masyarakat di Indonesia.
- b. Gotong royong; pola ini merupakan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kekerabatan atau hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, aktivitas kerja sama antara sejumlah besar warga desa untuk menyukseskan suatu proyek tertentu yang ada di desa yang di anggap berguna bagi kepentingan umum.
- c. Musyawarah dan jiwa musyawarah; musyawarah adalah gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya, sebagai suatu cara berapat, musyawarah di desa harus ada kekuatan atau tokoh-tokoh yang dapat mendukung proses mencocokkan, mengintegrasikan pendapat agar tidak ada perbedaan satu sama lainnya (Sajogyo dan Pudjiwati, 2008:21-31).

Dari beberapa pernyataan dan karakteristik yang sudah dijelaskan diatas, maka yang dimaksud masyarakat pedesaan adalah sekelompok masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan corak kehidupan yang relatif sama dan saling mengenal yang diikat dengan kehidupan tata nilai adat-istiadat yang diakui dan dihormati secara bersama.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (*menggambarkan*) kegiatan yang harus dilaksanakan kala kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Sedangkan operasional secara sederhana merupakan penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari suatu variabel.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada kajian pustaka tersebut maka peneliti akan mendefenisikan konsep-konsep yang menjadi kebutuhan penelitian, yaitu sebagai berikut;

- 1.) Administrasi negara adalah proses kerja sama untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.
- 2.) Partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat ikut berperan serta atau dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan.
- 3.) Pembangunan adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh negara secara terencana menuju kearah yang lebih baik.
- 4.) Masyarakat desa adalah sekelompok masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan corak kehidupan yang relatif sama dan saling mengenal yang diikat dengan kehidupan tata nilai adat-istiadat yang diakui dan dihormati secara bersama.

2.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 2.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Konsep Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	1. Tahapan Perencanaan	1. Menghadiri undangan rapat 2. Mengemukakan pendapat 3. Merumuskan kegiatan
	2. Tahapan Pelaksanaan	1. Keterlibatan dalam pelaksanaan 2. Mensukseskan kegiatan 3. Rasa memiliki
	3. Tahapan Pengawasan	1. Meminta Transparansi 2. Meminta Akuntabilitas 3. Kesesuaian kegiatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif, yaitu hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan key informan, dimana peneliti akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian, kemudian peneliti berusaha mengumpulkan dan mengklarifikasikan serta menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme dan sekaligus menjadikan peneliti sebagai instrument kunci.

Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana yang terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperhatikan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin dan jika itu informasi maka informasi terekam/dicatat sebagaimana keluar dari sumbernya. Kemudian dengan pendekatan kualitatif juga akan dapat menemukan pemahaman dan interpretasi atau makna terhadap suatu gejala secara induktif. Metode penelitian kualitatif ini akan difokuskan pada “Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.2 Informan

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber ataupun objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan dijadikan informan sebagai instrumen pengumpulan data adalah supaya pokok permasalahan yang diperlukan dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut selama wawancara dilaksanakan. Berikut ini adalah tabel jumlah informan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan
dalam Bidang Pembangunan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Informan	Jumlah	Persentase %
1.	Sekretaris Desa	1	14.28
2.	Ketua BPD	1	14.28
3.	Perangkat Desa	1	14.28
4.	Tokoh Adat	1	14.28
5.	Tokoh Agama	1	14.28
6.	Tokoh Pemuda	1	14.28
7.	Tokoh Perempuan	1	14.28
Total		7	100

Sumber : Data di olah oleh Peneliti Tahun 2023

3.3 Sumber Data Penelitian

Merujuk kepada pendapat Ridwan (2010:97) bahwa ada dua jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang dihimpun langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan wawancara, berupa

tanggapan key informan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana “Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data olahan yang telah dipublikasikan, baik berbentuk jurnal penelitian terdahulu, dan buku-buku penunjang yang relevan dengan penelitian “Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.4 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan” dilaksanakan oleh peneliti adalah di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.5. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara :

3.6.1 Interview

Interviwe (wawancara) yakni, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaa-pertanyaan secara tertulis tentang bagaimana “Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.6.2 Observasi

Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, melalui dokumen-dokumen yang ada di tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003:103) adalah proses

mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, kemudian penuliskan akan mengelompokkan data dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk analisis dengan metode deskriptif, yakni suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).

Dalam tahap ini peneliti merangkum atau menyederhanakan data yang telah diperoleh peneliti dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, memilih data-data yang dianggap penting, membuang data yang tidak dipakai, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:249) dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah digolongkan ke dalam pola-pola hubungan interaktif agar dapat lebih mudah dipahami pengguna laporan penelitian. Penyajian data ini dapat berupa bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara di lapangan terhadap informasi yang menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2014:253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas, ataupun dapat berupa hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan reduksi data, dan data tersebut telah didukung oleh data yang mantap, maka peneliti dapat menarik kesimpulan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi” dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Tahun 2022/23						
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nop	Feb	Juli
1	Pengajuan Judul							
2	Persiapan Penyusunan							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Proposal							
6	Bimbingan skripsi							
7	Turun lapangan							
8	Bimbingan							
9	Olahan data							
10	Ujian skripsi							
11	Revisi skripsi							

Sumber Modifikasi Peneliti Tahun 2023

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Teluk Pauh

Nama Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berawal dari masa pemerintahan orde baru tahun 1972, yang sebelumnya dinamakan Nagori dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Pak Wali). Pertumbuhan pembangunan fisik maupun infrastruktur dimulai dari dana bantuan pemerintah pusat (bangdes infers) dan mulai menampakkan hasil pembangunannya, kemudian pembangunan seni budaya dan adat istiadat. Sosial masyarakat didorong semangat hidup kegotong royongan, kebersamaan sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya agamis dan bersahaja.

Mayoritas masyarakat desa Teluk Pauh merupakan petani, ada 2 jenis tanaman yang menjadi sumber mata pencarian mereka yaitu Karet dan Sawit. Selain memiliki mata pencarian yang telah disebutkan di atas, ada juga penduduk desa Teluk Pauh memiliki hewan ternak seperti kambing atau sapi. Akan tetapi sangat disayangkan dalam hal pemberian pakan hewan ternak dan cara pengurusannya, karena hewan-hewan tersebut dibiarkan saja berkeliaran diareal penduduk untuk mencari makan sendiri bahkan sampai memasuki halaman dan merusak tanaman yang ada di rumah warga tersebut, ini salah satu alasan mengapa setiap rumah yang ada di desa Teluk Pauh diberi pagar. Selain itu kotoran-kotoran hewan tersebut juga banyak terdapat di sepanjang jalan desa Teluk Pauh dan merusak kenyamanan para pengguna jalan tersebut.

Desa Teluk Pauh merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama islam. Menurut data yang ada , hampir 99 % masyarakatnya beragama islam. Sarana dan prasarana peribadaan yang ada di desa Teluk Pauh berupa 1 mesjid besar yaitu mesjid Al-husna, dan 1 Mushallah yang tersebar di 2 Dusun, Suku atau etnis penduduk Desa Teluk Pauh adalah suku melayu dan jawa , mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli asal Desa Teluk Pauh, sedangkan penduduk pendatang adalah suku jawa. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Teluk Pauh berupa 1 gedung kantor kepala desa, di Desa Teluk Pauh juga terdapat wadah PKK dengan segenap pengurus yang telah memadai dan aktif untuk melakukan berbagai kegiatan.

Prasarana kesehatan yang tersedia didesa Teluk Pauh berupa 1 posyandu dan 1 poskesdes Prasarana kesehatan yang ada dilengkapi juga dengan sarana kesehatan yang terdiri dari 1 Dokter umum, 1 bidan dan 2 dukun alternatif. Jika dilihat dari keadaan yang ada untuk fasilitas kesehatan yang tersedia masih jauh dari kata lengkap karena masih banyaknya alat-alat yang tidak tersedia di Poskesdes Desa Teluk Pauh sehingga pasien yang ada masih harus pergi ke Puskesmas Kabupaten yang ada di Desa Kompe Berangin. Dalam bidang pendidikan sarana yang tersedia berupa 1 Gedung SD (Sekolah Dasar), 1 Gedung MDA, 1 Gedung PAUD.

4.2 Demografis

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Kantor Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis berada disebelah timur ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi

(Teluk Kuantan) dengan jarak lebih kurang 50 Km. dan berbatasan dengan beberapa kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Selunak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Bayur.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesikaian.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Panjang.

Sementara jarak tempuh ke Ibu kota Provinsi Riau (Pekanbaru) lebih Kurang 250 Km atau memakan waktu sekitar 8 jam dan dapat ditempuh dengan lancar menggunakan kendaraan roda empat. Sampai saat ini Kantor Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah berusia lebih kurang puluhan tahun, dan telah mengalami beberapa kali pergantian Pimpinan

4.2.2 Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 20 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 50 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 90 Menit

4.3 Kependudukan

1. Kepala Keluarga : 157 KK
 - Laki-laki : 133 KK
 - Perempuan : 24 KK
2. Penduduk : 626 jiwa
 - Laki-laki : 312 jiwa
 - Perempuan : 314 jiwa

4.4 Keadaan Sosial

4.4.1 Pendidikan

1. SD	: 73- Orang
2. SLTP/MTs	: - Orang
3. SLTA/MA	: - Orang
4. Diplomat	: - Orang
5. Putus Sekolah	: - Orang
6. Buta Huruf	: - Orang

4.4.2 Lembaga Pendidikan

1. Gedung PAUD	: 1 Buah Lokasi Dusun II RT 006/RW 003
2. SD	: 1 Buah Lokasi Dusun II RT 006/RW 003
3. MDA	: 1 Buah Lokasi Dusun I RT 002/RW 001

4.4.3 Luas Wilayah Desa

Pemukiman Warga	: 800Ha
Pertanian Sawah	: 5 Ha
Ladang	: - Ha
Hutan	: - Ha
Rawa-rawa	: 40 Ha
Perkantoran	: - Ha
Sekolah	: 1,5 Ha
Jalan	: 5 Ha
Lapangan Sepak Bola	: Ha

4.4.4 Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Padi Sawah | : - Ha |
| 2. Padi ladang | : - Ha |
| 3. Jagung | : - Ha |
| 4. Palawija | : ± 5 Ha |
| 5. Sawit | : ± 50 Ha |
| 6. Karet | : ± 300 Ha |
| 7. Kelapa | : - Ha |
| 8. Lain-lain | : - Ha |

4.4.5 Peternakan

Jenis Ternak :

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Kambing | : 200 ekor |
| 2. Sapi | : 247 ekor |
| 3. Kerbau | : 20 ekor |
| 4. Ayam | : 280 ekor |
| 5. Itik | : 10 ekor |
| 6. Lain-lain | : ekor |

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa

4.5.1 Lembaga pemerintahan Desa

Jumlah aparat Desa

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 orang |

- | | |
|-------------------|-----------|
| 3. Perangkat Desa | : 6 orang |
| 4. BPD | : 5 orang |

4.5.2 Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. LPM | 1 |
| 2. PKK | 1 |
| 3. Posyandu | 2 |
| 4. Pengajian | : 1 kelompok |
| 5. Arisan | : 1 kelompok |
| 6. Simpan pinjam | : kelompok |
| 7. Kelompok tani | : 3 kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1 kelompok |
| 9. Karang taruna | : kelompok |
| 10. Lain-lain | : - kelompok |

4.5.3 Pembagian wilayah

Nama Dusun:

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. Dusun 1 | : Jumlah RT 4/ RW 2 |
| 2. Dusun 2 | : Jumlah RT 4/ RW 2 |

4.6 Struktur Organisasi Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan

Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

NAMA-NAMA APARAT DESA

1. Kepala Desa : MASDI
2. Sekretaris Desa : SYAMSIR.K
3. Kaur Keuangan : NOPIA NURUL FITRI
4. Kepala Seksi pemerintah : ARIADI
5. Kepala Seksi Kesejahteraan : JAPRIANTO
6. Kepala urusan umum : SYAHRUDDIN

Kepala Dusun:

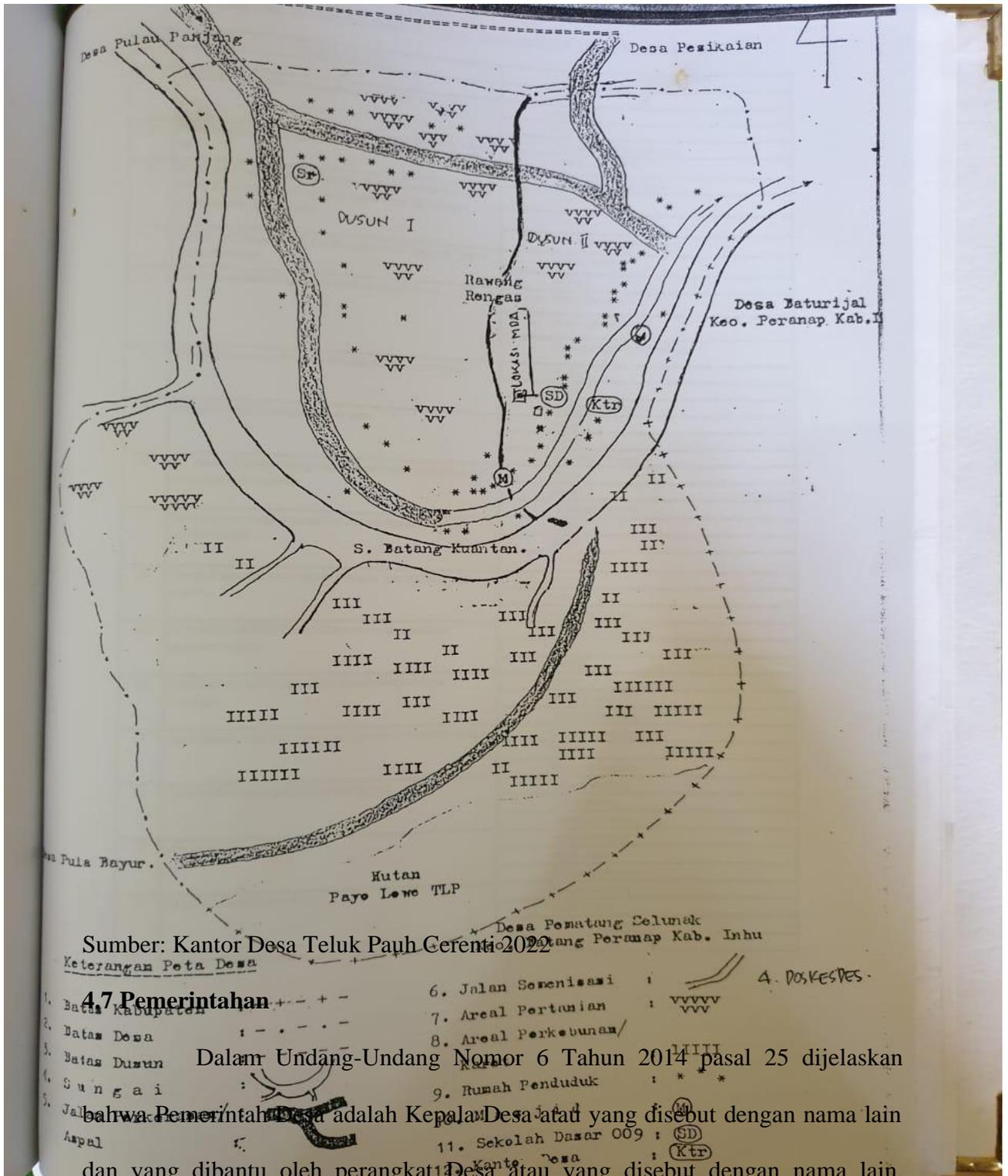
1. Dusun 1 : APRIMAN
2. Dusun 2 : REPELITA

Susunan Anggota BPD

Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti

1. Ketua : M.I GUNAWAN
2. Wakil Ketua : ELPARONI
3. Sekretaris : WAHYU NINGSIH
4. Anggota : ERLISMAN
5. Anggota : MITRA SUSANTI

Peta Desa Teluk Pauh



Pemerintah Desa bertugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa juga memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti masalah kependudukan, kesehatan, ketertiban keamanan dan sebagainya. Untuk melihat struktur organisasi Pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilihat pada gambar dibawah ini;

4.7. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

4.7.1 Kedudukan Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pelaksanaan pembangunan;
6. Pembinaan kemasyarakatan;
7. Pemberdayaan masyarakat; dan
8. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

4.7.2 Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan APBDES;
6. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
7. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.7.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa

A. Tugas Sekretaris Desa / Juru Tulis

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

B. Fungsi Sekretaris Desa / Juru Tulis

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

4.7.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

A. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

B. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Penyusunan rancangan regulasi desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
6. Penataan dan pengelolaan wilayah;
7. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
8. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

4.7.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

A. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

B.Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasaranan pembangunan Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
5. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Pelayanan kepada masyarakat;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

4.7.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

A. Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

B. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
6. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidangnya;
7. Pelayanan kepada masyarakat;
8. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidangnya;

10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
11. Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

4.7.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

A. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B.Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

1. Administrasi surat menyurat;
2. Arsip;
3. Ekspedisi;
4. Penataan administrasi perangkat desa;
5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
6. Penyiapan rapat;
7. Pengadministrasian aset;
8. Inventarisasi;
9. Perjalanan dinas;
10. Pelayanan umum; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

4.7.8 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

A. Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

1. Menyusun rencana APBDesa;
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
4. Penyusunan laporan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

4.7.9 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

A. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B.Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. Pengurusan administrasi keuangan;
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

4.7.10 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun

A.Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

B.Fungsi Kepala Dusun

1. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;

3. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. Pelayanan kepada masyarakat;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini penulis mengambil dan menggunakan 7 orang Informan sebagai informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini. Semua data dan informasi dalam karya ilmiah ini nantinya merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 7 orang informan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 7 informan maka diketahui beberapa identitas informan sebagai berikut :

5.1.1. Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, tingkat usia memberi pengaruh. Semakin tinggi usia, maka keputusan yang akan diambil akan semakin baik karena tingkat umur akan memberi pengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berfikir, Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-29	1	14%
2	30-39	2	29%
3	40-49	2	29%
4	≥50	2	29%
Jumlah		7	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5.1.dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat 40-49 tahun yakni sebanyak 29% dari keseluruhan jumlah responden yang ada dan yang paling sedikit responden yang berusia 20-29 tahun berjumlah 1 orang atau 14% dari keseluruhan jumlah informan yang akan diwawancarai nantinya.

5.1.2. responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis kelamin yang akan dijelaskan pada table 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Klasifikasi Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	7	100
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		7	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 7 orang atau sebesar 100% dari keseluruhan jumlah informan. Sedangkan responden perempuan sebanyak 0 orang atau sebesar 0% dari keseluruhan jumlah responden yang akan diwawancarai nantinya dilapangan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah informan yang berjenis perempuan.

5.1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan	Persentase (%)
1.	SD	0	7,69%
2.	SLTP	1	26,92%
3.	SLTA	5	50%
4.	S1	1	15,38%
5.	S2	0	0%
Jumlah		1	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SLTA yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 50% dari jumlah keseluruhan informan yang tersedia, sedangkan untuk informan yang berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 0 orang atau sebesar 0% dari keseluruhan jumlah informan, sebanyak 0 orang yang berpendidikan SLTP, 0 orang yang berpendidikan Sarjana dan untuk tingkat pendidikan S2 yaitu tidak ada atau 0%. sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan dari informan itu sendiri yang paling banyak adalah tingkat SLTA.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Yang dimaksud dengan Pembangunan adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh negara secara terencana menuju kearah yang lebih baik.

Untuk melihat lebih jelasnya tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka disini peneliti melihatnya dari semua indikator

yang telah ditetapkan diawal penulisan, yang mana indikator dari Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk lebih detil lagi, dalam menguraikan hasil penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan kepada seluruh informan dalam bentuk diskusi dan wawancara secara langsung dengan informan tersebut, dengan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang mana pertanyaan tersebut peneliti susun dalam beberapa indikator dan dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini:

5.2.1. Indikator Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya sulit untuk bisa diukur dan tidak jelas arah pembangunannya. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu hadir dalam rapat pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam rapat desa yang diadakan oleh pemerintah desa teluk pauh, masyarakat terkadang cukup antusias untuk mengikuti dan menghadiri rapat pembangunan desa tersebut, sehingga banyak ide dan masukan yang diberikan oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“ya dari data yang kami terima melalui berita acara musyawarah desa teluk pauh dan absensi musyawarah desa tersebut memang masyarakat teluk pauh cukup lumayan banyak yang hadir dalam musyawarah desa tersebut, dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat desa serta perangkat desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“memang untuk masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh sudah lumayan banyak yang berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut, dengan banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat desa melalui kepala dusun, menandakan masyarakat cukup antusias dan peduli terhadap pembangunan desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau untuk masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya sudah antusias dengan dilaksanakan musyawarah desa secara bertahap, sehingga kegiatan tersebut menjadi ajang bagi semua warga desa teluk pauh untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa teluk pauh dalam pembangunan” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Padius yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau kami sebagai masyarakat desa teluk pauh selalu hadir dalam musyawarah desa, terutama dalam musyawarah pembangunan desa teluk pauh, dan pemerintah desa teluk pauh selalu memberikan jalan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah desa yang ada di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, memang semua masyarakat tersebut kebanyakan menghadiri setiap undangan yang disampaikan oleh pemerintah desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pertama yaitu tahapan perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti diberikan kesempatan untuk mengemukakan dan menyampaikan pendapat?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam rapat desa yang diadakan oleh pemerintah desa teluk pauh, tentu kami memberikan dan membukan pintu kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri rapat pembangunan desa tersebut, sehingga banyak ide dan masukan yang diberikan oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“data yang kami terima melalui berita acara musyawarah desa teluk pauh dan absensi musyawarah desa tersebut memang masyarakat teluk pauh cukup lumayan aktif dalam memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi untuk pembangunan desa teluk pauh kecamatan cerenti” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun II Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Repelita yang mengatakan hal sebagai berikut:

“untuk masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh lumayan banyak yang berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut, hal ini didapat dari hasil musyawarah desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya sudah diberikan kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa, terkadang mereka menyampaikan aspirasi tersebut melalui ucapan ketua badan permusyawaratan desa” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Erdison yang mengatakan hal sebagai berikut:

“sebagai masyarakat desa teluk pauh kami memang diberikan kesempatan dan peluang untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dalam musyawarah desa, terutama dalam musyawarah pembangunan desa teluk pauh, dan pemerintah desa teluk pauh selalu memberikan jalan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pertama yaitu tahapan perencanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu dilibatkan dalam merumuskan suatu kegiatan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau dalam perumusan kebijakan diadakan oleh pemerintah desa teluk pauh, tentu kami memberikan dan membukan pintu kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri rapat pembangunan desa tersebut, sehingga banyak ide dan masukan yang diberikan oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“musyawarah desa teluk pauh terkdang juga dalam perumusan kebijakan selalu kami libatkan, terutaman kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa teluk pauh, sehingga masyarakat desa teluk pauh ada sebagian yang kami libatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh dalam hal perumusan kebijakan pemerintah desa juga ada yang dilibatkan, hal ini didapat dari hasil musyawarah desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau masyarakat desa teluk pauh secara umum mungkin tidak terlibat secara langsung, tetapi itu semuanya sudah diberikan kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa, terkadang mereka menyampaikan aspirasi tersebut melalui ucapan ketua badan permusyawaratan desa” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kaecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Yumardi yang mengatakan hal sebagai berikut:

“tokoh masyarakat desa teluk pauh kami memang diberikan kesempatan dan peluang untuk dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi dan masukan dalam musyawarah desa, terutama dalam perumusan kebijakan pemerintah desa teluk pauh yang berkaitan dengan pembangunan desa” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan dari masyarakat tersebut sering dilibatkan dan terlibat dalam tahap perencanaan pembangunan desa teluk pauh. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang informan dilapangan terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil observasi peneliti dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk tahap perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat pedesaan dirasa cukup lumayan tinggi dalam Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.2 Indikator Tahap Pelaksanaan

Berikunya adalah indikator tentang Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana salah satu Indikatornya adalah tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan yaitu Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pada dasarnya adalah melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui musrenbangdes, sehingga perlu diberikan ruang bagi kepentingan dan inisiatif yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Untuk melihat dan mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana atau belum, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang ditanyakan secara langsung, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam rangka setiap kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, masyarakat terkadang selalu dilibatkan untuk mengikuti pembangunan desa tersebut, sehingga banyak pekerjaan pembangunan diberikan oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“ya dari pantauan data yang kami terima melalui berita acara pelaksanaan pembangunan desa teluk pauh masyarakat teluk pauh cukup lumayan banyak yang hadir dalam pembangunan desa tersebut, dan juga masyarakat sangat menantikan setiap pelaksanaan pembangunan desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“memang untuk masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh sudah lumayan banyak yang berpartisipasi dalam pembangunandes tersebut, dengan banyaknya partisipasi masyarakat desa yang ikut dalam pembangunan desa melalui kepala

dusun, menandakan masyarakat cukup antusias dan peduli terhadap pembangunan desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau untuk masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya sudah terlibat atas partisipasinya dalam pembangunan walaupun secara bertahap, sehingga kegiatan tersebut menjadi ajang bagi semua warga desa teluk pauh untuk membangun desa teluk pauh dalam pembangunan” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Padius yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau kami sebagai masyarakat desa teluk pauh selalu mendukung dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam pembangunan desa teluk pauh, dan pemerintah desa teluk pauh selalu memberikan jalan kepada kami untuk masyarakat desa teluk pauh untuk selalu terlibat dalam setiap pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang ada di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, memang semua masyarakat tersebut kebanyakan menghadiri setiap adanya pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator kedua yaitu tahapan pelaksanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti turut mensukseskan setiap kegiatan pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“pemerintah desa teluk pauh selalu mengajak masyarakat untuk selalu ikut dan berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh. tentu kami memberikan dan membukan pintu kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri pembangunan desa tersebut, sehingga banyak masyarakat desa dalam pembangunan desa tersebut yang terlibat” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dari jumlah musyawarah desa teluk pauh dan absensi pembangunan desa tersebut memang masyarakat teluk pauh cukup lumayan aktif dalam memberikan mensukseskan pembangunan desa teluk pauh kecamatan cerenti” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun II Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Repelita yang mengatakan hal sebagai berikut:

“untuk masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh lumayan banyak yang berpartisipasi dan menyukseskan pembangunan desa tersebut, hal ini didapat dari hasil dilapangan dalam pembangunan desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya kami rasa sudah ikut berpartisipasi dan menyukseskan pembangunan desa, terkadang mereka menyampaikan inovasi terbaru terhadap pembangunan melalui ucapan ketua badan permusyawaratan desa” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Erdison yang mengatakan hal sebagai berikut:

“untuk masyarakat desa teluk pauh, masyarakat diberikan kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dan memberikan apresiasi dalam pembangunan desa, terutama dalam pembangunan desa teluk pauh, dan pemerintah desa teluk pauh selalu memberikan jalan kepada kami untuk mensukseskan pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator kedua yaitu tahapan pelaksanaan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti mempunyai rasa memiliki dari setiap kegiatan dan aset pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kami rasa pemerintah desa teluk pauh, dan juga masyarakat desa teluk pauh tentu kami rasa yang sama dan mempunyai rasa memiliki terhadap setiap pembangunan desa tersebut, sehingga banyak pembangunan desa tersebut selalu terawat dan dijaga oleh masyarakat desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam pembangunan desa teluk pauh, masyarakat desa teluk pauh sebagian kami rasa memang sudah mempunyai rasa memiliki dari setiap pembangunan desa yang diadakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, hal ini nampak dari setiap kegiatan desa masyarakat selalu memanfaatkan fasilitas desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh lumayan cukup mempunyai rasa memiliki terhadap setiap pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal ini didapat dari hasil musyawarah desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menjaga fasilitas pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau masyarakat desa teluk pauh secara umum mungkin kami rasa sudah cukup mempunyai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap setiap pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, tetapi itu semuanya dapat dilihat dari beberapa aspek pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Yumardi yang mengatakan hal sebagai berikut:

“sebagai tokoh masyarakat desa teluk pauh kami memang memiliki rasa kepemilikan setiap pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, dan ini merupakan salah satu bentuk rasa terimakasih kami sebagai masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan dari masyarakat tersebut sering dilibatkan dan terlibat dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa teluk pauh. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberpa orang informan dilapangan terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan

Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil observasi peneliti dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk tahap pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat pedesaan dirasa cukup lumayan tinggi dalam Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.3 Tahap Pengawasan

Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan adalah bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang di dilaksanakan oleh Pemerintah. Berpedoman pada pendapat diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penyelenggaran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kompenen lainnya untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan di desa.

Untuk melihat dan mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana atau belum, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang ditanyakan secara langsung, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu memintak kejelasan setiap pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam rangka setiap kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, masyarakat tentu ingin memintak kejelasan dan transparansi pembangunan desa, tetapi secara langsung dan terbuka, jarang masyarakat yang menanyakan secara langsung, karena setiap kegiatan pembangunan desa selalu kami buat pengumuman dan paparan informasi pembangunan desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“ya, kalau itu sudah pasti dari pantauan data yang kami terima masyarakat pasti meminta kejelasan dari setiap pelaksanaan pembangunan desa teluk pauh dan masyarakat teluk pauh cukup lumayan mengerti dan paham setiap pembangunan desa tersebut, dan juga masyarakat sangat menantikan setiap pelaksanaan pembangunan desa tersebut” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“memang untuk masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh meminta kejelasan pembangunan desa tersebut, terutama kejelasan anggaran pembangunan desa tersebut, dengan banyaknya partisipasi masyarakat desa yang ikut dalam pembangunan desa melalui kepala dusun, menandakan masyarakat cukup antusias dan peduli terhadap pembangunan desa” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau untuk masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya sudah pasti ingin kejelasan setiap pelaksanaan pembangunan walaupun secara bertahap, terutama kejelasan masalah anggaran pembangunan desa, sehingga kegiatan tersebut menjadi ajang bagi semua warga desa teluk pauh untuk membangun desa teluk pauh dalam pembangunan” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Padius yang mengatakan hal sebagai berikut:

“sebagai masyarakat desa teluk pauh selalu mendukung dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam pembangunan desa teluk pauh, dan masyarakat desa teluk pauh juga selalu memintak kejelasan setiap pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang ada di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, memang semua masyarakat tersebut kebanyakan menanyakan kejelasan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator ketiga yaitu tahapan pengawasan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti meminta pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“pemerintah desa teluk pauh selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk laporan pertanggungjawaban dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh. tentu kami memberikan dan membukan pintu kepada seluruh masyarakat untuk menanyakan setiap pelaksanaan pembangunan desa tersebut, sehingga banyak masyarakat desa dalam pembangunan desa tersebut yang merasa adanya keterbukaan infromasi” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau untuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pembangunan desa tersebut memang selalu kami sampaikan kepada masyarakat teluk pauh guna untuk memberikan keterangan kepada orang banyak terhadap setiap kegiatan pembangunan desa teluk pauh kecamatan cerenti” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun II Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Repelita yang mengatakan hal sebagai berikut:

“biasanya masyarakat yang ada di desa Teluk Pauh lumayan banyak yang menanyakan kepada kami selaku kepala dusun terhadap setiap kegiatan pembangunan desa tersebut, hal ini juga telah kami sampaikan kepada pemerintah desa terhadap setiap pembangunan desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan untuk pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat desa teluk pauh, itu semuanya kami rasa sudah puas terhadap setiap laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, terkadang mereka menyampaikan hal itu terhadap pembangunan desa melalui ucapan ketua badan permusyawaratan desa” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Erdison yang mengatakan hal sebagai berikut:

“masyarakat desa teluk pauh, sebagian masyarakat diberikan kesempatan dan peluang untuk menanyakan laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pembangunan desa, terutama dalam pembangunan desa teluk pauh, dan

pemerintah desa teluk pauh selalu memberikan kejelasan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikutnya adalah masih pertanyaan yang berkaitan dengan indikator ketiga yaitu tahapan pengawasan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah setiap kegiatan pembangunan desa sudah sesuai dengan tahap perencanaan pembangunan desa?

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syamsir K yang mengatakan hal sebagai berikut:

“untuk pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa teluk pauh sudah melaksanakan setiap kegiatan pembangunan telah sesuai dengan tahap perencanaan pembangunan desa tersebut, sehingga banyak pembangunan desa tersebut selalu selalu lancar dan disenangi oleh masyarakat desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Japrianto yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dalam pembangunan desa teluk pauh, setiap pelaksanaan pembangunan desa yang diadakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, selalu sesuai dengan tahap perencanaan pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala dusun I Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Apriman yang mengatakan hal sebagai berikut:

“setiap pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, kami rasa memang kebanyakan dari pembangunan desa tersebut memang sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa, masyarakat selalu bersemangat dalam menjaga fasilitas pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 05 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Muhammad Indra Gunawan yang mengatakan hal sebagai berikut:

“kalau untuk pemerintah desa teluk pauh secara umum mungkin kami rasa sudah cukup konsisten terhadap setiap pelaksanaan pembangunan desa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh, dan itu semuanya dapat dilihat dari beberapa aspek pembangunan desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Yumardi yang mengatakan hal sebagai berikut:

“dari informasi masyarakat desa teluk pauh kami memang pemerintah desa teluk pauh sudah melaksanakan setiap pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa teluk pauh sudah sesuai dengan tahap perencanaan, dan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah desa teluk pauh terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di desa teluk pauh” (wawancara langsung 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan dari masyarakat tersebut sering dilibatkan dan terlibat dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa teluk pauh. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang informan dilapangan terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil observasi peneliti dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk tahap pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat pedesaan dirasa cukup lumayan tinggi dalam Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara peneliti dengan informan dan hasil observasi peneliti, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan dengan cukup tinggi.

6.2 Saran

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka untuk kebaikan kita semua pihak pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka disini peneliti memberikan beberapa saran

dan masukan yang bersifat membangun, dan sarannya adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi selalu terbuka kepada masyarakat terhadap pembangunan desa.
2. Masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi harus sering aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan desa.
3. Masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi selalu menjaga setiap fasilitas pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmadi, Abu dan Cholid Nurboko. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Alex, MA., 2014. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alpa

Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Faried. 2013. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiardjo Meriam, Prof., 2014. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dantes, nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Dewi, Irra Chrisyanti, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Prestasi Jakarta, Pustakaraya.

Dunn, William N., 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

Fakih, Mansour, Dr., 2010. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insis Press.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

H. Makmur. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khaerul Umam. 2010. *Perilaku Organisasi CV*. Pustaka Setia

Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Kybernology ; Ilmu Pemerintahan Baru*; Edisi I, Jakarta : Rineka Cipta.

Nugroho, Rian D., 2018. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasution, Zulkarimen. 2013. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Raja Wali Press.

Retno Sunu Astuti, 2014. *Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam meningkatkan daya saing bangsa*. Semarang. UNDIP

Siagian P. Sondang. 2018. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sajogyo, Pudjiwati, 2008. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Soekanto Soerjono, 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Solekhan, Moch. 2017. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sutrisno, Edi. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. Dr., 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryaningrat, Bayu, Drs., 2011. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Terry, George. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah, 2013. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Varma SP., 2012. *Teori Politik Modern*, Terjemahan Yohanes Kristiarto dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

LAINNYA

<http://repository.unpas.ac.id.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi>

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, dan Pelalawan Sebagai Daerah Otonom Baru.

Dokumen Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.















DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas peneliti

1. Nama : MASDI
2. NPM : 190411072
3. Program Studi : Administrasi Negara
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
6. Alamat : Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti
7. No Hanphon : 0822-5925-2442
8. Judul Penelitian : Analisis Partisipasi Masyarakat Pedesaan
Dalam Pembangunan Di Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis kelamin :
4. Tingkat pendidikan :
5. Usia :
6. Pekerjaan :
7. Jabatan :
8. Alamat :

C. Petunjuk

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Wawancara ini tidak sedikitpun mengandung unsur politik.
3. Hasil wawancara dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
4. Identitas bapak / ibu /sdr/i dijamin kerahasiannya.
5. Atas kerja sama Bapak / Ibu/Sdr/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

A. Indikator Tahap Perencanaan

1. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu hadir dalam rapat pembangunan desa?

.....
.....

2. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti diberikan kesempatan untuk mengemukakan dan menyampaikan pendapat?

.....
.....

3. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu dilibatkan dalam merumuskan suatu kegiatan desa?

.....
.....

B. Indikator Tahapan Pelaksanaan

1. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan desa?

.....
.....

2. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti turut mensukseskan setiap kegiatan pembangunan desa?

.....
.....

3. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti mempunyai rasa memiliki dari setiap kegiatan dan aset pembangunan desa?

.....
.....

C. Indikator Tahapan Pengawasan

1. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti selalu memintak kejelasan setiap pembangunan desa?

.....
.....

2. Apakah masyarakat Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti meminta pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan desa?

.....
.....

3. Apakah setiap kegiatan pembangunan desa sudah sesuai dengan tahap perencanaan pembangunan desa?

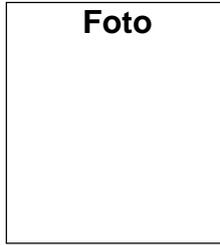
.....
.....

Inuman, Juni 2023
Informan

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Foto



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	MASDI
Tempat, Tanggal Lahir	Teluk Pauh, 03 Juli 1981
Nomor Mahasiswa	190411072
Angkatan/Tahun Masuk	2019
Program Studi	Administrasi Negara
Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial
Universitas	UNIKS
Konsentrasi	Kebijakan Publik
Agama	Islam
Pekerjaan Sekarang	Mahasiswa
Alamat Instansi	Teluk Kuantan
Alamat Tempat Tinggal	Desa Teluk Pauh Cerenti
Nomor Handphone	0822-5925-2442

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TINGKAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN
SD	SDN 009 Teluk Pauh	Cerenti	1994
SLTP	MTs N Pangean	Pangean	1997
SLTA	SMUN 1 Cerenti	Cerenti	2000
PT	UNIKS	Teluk Kuantan	2023

Cerenti, Juli 2023
Yang menerangkan,

MASDI

